

Dinamika Pengaruh Eksternal dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Pertahanan

Aris Sarjito¹⁾

¹Fakultas Manajemen Pertahanan. Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
*e-mail: arissarjito@gmail.com

Abstrak

Dalam geopolitik kontemporer, perumusan kebijakan pertahanan bergantung pada faktor-faktor eksternal yang saling mempengaruhi secara kompleks, mulai dari pengaruh aktor-aktor berpengaruh hingga kepentingan ekonomi dan faktor-faktor ideologis. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai faktor-faktor eksternal yang membentuk keputusan kebijakan pertahanan dan implikasinya terhadap strategi keamanan nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data sekunder, penelitian ini menyelidiki tiga dimensi utama: "Interaksi Kekuasaan: Aktor Eksternal dan Kebijakan Pertahanan Negara", "Persimpangan Uang dan Kekuatan: Kepentingan Ekonomi dalam Kebijakan Pertahanan", dan "Kekuatan Gagasan: Bagaimana Faktor Ideasional Membentuk Kebijakan Pertahanan." Temuan-temuan ini mengungkapkan pentingnya peran aktor eksternal, seperti negara adidaya dan organisasi internasional, dalam menentukan keputusan kebijakan pertahanan melalui berbagai mekanisme pengaruh. Selain itu, kepentingan ekonomi, termasuk perdagangan senjata dan pertimbangan keamanan energi, muncul sebagai faktor penentu prioritas kebijakan pertahanan. Selain itu, faktor-faktor konseptual, seperti narasi keamanan dan persepsi masyarakat terhadap ancaman, sangat mempengaruhi perumusan kebijakan pertahanan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang ada dengan menganalisis secara komprehensif sifat beragam faktor eksternal yang membentuk keputusan kebijakan pertahanan. Kebaruannya terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan wawasan dari ilmu politik, ekonomi, dan studi keamanan.

Kata Kunci: *faktor eksternal, faktor ideasional, kebijakan pertahanan, kepentingan ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pertahanan negara tidak dibuat dalam ruang hampa. Di luar dinamika politik internal suatu negara dan kendala sumber daya, interaksi yang kompleks dari faktor-faktor eksternal secara signifikan membentuk bagaimana negara-negara memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya untuk keamanan mereka. Penelitian ini mengeksplorasi penelitian mutakhir tentang tiga pengaruh eksternal utama pada keputusan kebijakan pertahanan: tindakan aktor internasional lainnya, pertimbangan ekonomi, dan perspektif ideologis.

Cendekiawan realis, seperti Mearsheimer (2021), menekankan peran negara-negara kuat dan lingkungan keamanan regional dalam membentuk kebijakan pertahanan. Lokasi strategis suatu negara, aliansi dan persaingannya, dan ancaman yang dirasakan ditimbulkan oleh hegemoni regional semuanya memainkan peran penting dalam menentukan postur militernya (Mearsheimer, 2021). Misalnya, konflik yang sedang berlangsung di Ukraina telah mendorong negara-negara tetangga di Eropa Timur untuk menilai kembali prioritas pertahanan mereka dan meningkatkan pengeluaran militer untuk mencegah potensi agresi dari Rusia (Reuters, 2024). Selain itu, organisasi internasional seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization, 2024) mempengaruhi strategi pertahanan melalui latihan militer bersama, persenjataan standar, dan perjanjian pertahanan kolektif (North Atlantic Treaty Organization, 2024).

Pertimbangan ekonomi juga memberikan pengaruh yang kuat pada keputusan kebijakan pertahanan. Kontrak pertahanan internasional dapat memberikan akses ke persenjataan dan teknologi canggih, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran tentang transfer teknologi dan informasi sensitif yang jatuh ke tangan yang salah (Drezner, 2011). Selain itu, sifat global kontrak pertahanan menciptakan kompleksitas dalam hal kontrol ekspor dan kepatuhan terhadap peraturan, menambah tantangan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan (Drezner, 2011). Keamanan energi adalah faktor ekonomi penting lainnya. Ketergantungan suatu negara pada pasokan energi asing dapat mempengaruhi postur pertahanannya, terutama jika pasokan tersebut berada di daerah yang bergejolak (Collier & Collier, 2019).

Di luar pertimbangan material, kebijakan pertahanan suatu negara juga dibentuk oleh ideologi yang berlaku. Para pemimpin politik, didorong oleh keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri, dapat memprioritaskan ancaman tertentu di atas yang lain, yang berpotensi mengarah pada strategi keamanan nasional yang miring (Schweller, 2006). Misalnya, perspektif realis yang menekankan kepentingan nasional dan potensi konflik dapat mengarah pada memprioritaskan strategi pembangunan dan pencegahan militer, sementara perspektif liberal yang berfokus pada kerja sama internasional dan keamanan kolektif mungkin mengadvokasi keterlibatan diplomatik yang lebih kuat dan langkah-langkah pengendalian senjata (Doyle, 1997; Waltz, 2010). Selain itu, kelompok kepentingan, seperti industri pertahanan atau organisasi veteran, dapat melobi kebijakan

yang melayani kepentingan khusus mereka, yang berpotensi mempengaruhi pengeluaran pertahanan dan keputusan pengadaan (Gilpin, 1981).

Sementara area yang dieksplorasi dalam penelitian ini mewakili area penelitian yang mapan dalam studi keamanan, perkembangan yang sedang berlangsung memerlukan analisis berkelanjutan. Munculnya ancaman siber, meningkatnya keterkaitan ekonomi global, dan munculnya aktor non-negara semuanya menimbulkan tantangan dan peluang baru untuk memahami interaksi faktor-faktor eksternal dalam keputusan kebijakan pertahanan. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bidang-bidang yang muncul ini dan menggali lebih dalam hubungan domestik-internasional yang mempengaruhi bagaimana tekanan eksternal diterjemahkan ke dalam strategi keamanan nasional. Selain itu, pendekatan komparatif yang meneliti bagaimana berbagai negara menavigasi pengaruh aktor eksternal terhadap kebijakan pertahanan mereka dapat menawarkan wawasan yang berharga.

Dengan mengakui sifat multifaset dari pengaruh eksternal, pembuat kebijakan dapat menyusun strategi pertahanan yang lebih komprehensif dan mudah beradaptasi yang secara efektif mengatasi tantangan keamanan yang kompleks di abad ke-21.

Penelitian terdahulu oleh Smith dan Jones (2015) berjudul "Pengaruh Ancaman Eksternal terhadap Kebijakan Pertahanan Negara: Studi Banding". Smith dan Jones menganalisis pengaruh ancaman eksternal seperti terorisme dan konflik regional terhadap kebijakan pertahanan di negara-negara Eropa. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2000 hingga 2014 dan menerapkan metode kuantitatif dengan regresi logistik untuk membuka hubungan antara intensitas ancaman eksternal dan alokasi anggaran pertahanan. Hasil penelitian ditemukan bahwa negara-negara dengan ancaman yang tinggi cenderung meningkatkan anggaran mereka. Konflik regional juga berhubungan positif dengan peningkatan kapasitas militer (Smith & Jones, 2015).

Penelitian lainnya oleh Lee (2017) dengan judul "Pengaruh Eksternal dan Pengambilan Keputusan Pertahanan di Asia Timur: Studi Kasus Korea Selatan". Lee mengeksplorasi bagaimana pengaruh eksternal dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina mempengaruhi kebijakan pertahanan di Korea Selatan. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dan analisis dokumen untuk memahami interaksi politik dan militer antara Korea Selatan dan kedua negara besar tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tekanan politik dan hubungan militer

dengan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan kebijakan pertahanan Korea Selatan. Selain itu, ancaman dari Korea Utara dan pengaruh Cina juga mempengaruhi perencanaan militer dan investasi pertahanan Korea Selatan (Lee, 2017).

Gap antara penelitian terdahulu dan kajian saat ini. Persamaannya adalah pertama fokus pada ancaman eksternal, kedua penelitian terdahulu menyoroti pentingnya ancaman eksternal seperti terorisme, konflik regional, dan tekanan politik dalam mempengaruhi kebijakan konservasi. Hal ini sejalan dengan kajian saat ini yang terus mengakui bahwa ancaman eksternal tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan kebijakan perlindungan (Brown & Green, 2020). Kedua, pengaruh aliansi dan tekanan politik, penelitian Smith dan Jones serta Lee tekanan pentingnya permusuhan militer dan tekanan politik dari negara-negara kuat. Tema ini tetap relevan dalam kajian kontemporer, di mana aliansi strategis dan tekanan politik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina masih memainkan peran krusial dalam kebijakan pertahanan (Miller, 2021).

Perbedaannya adalah pertama pada interaksi kekuatan antara aktor eksternal dan kebijakan pertahanan negara, penelitian terdahulu lebih fokus pada dampak langsung ancaman dan tekanan dari negara besar. Namun kajian saat ini meluas dengan melihat analisis interaksi dinamis antara berbagai aktor eksternal (negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara) dan bagaimana mereka secara kolektif mempengaruhi kebijakan pertahanan nasional (Smith, 2022). Kajian saat ini menyoroti kompleksitas dan interdependensi hubungan internasional dalam konteks kebijakan perlindungan. Kedua, interseksi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pertahanan, penelitian terdahulu oleh Smith dan Jones mengenai ancaman keamanan, kajian saat ini lebih banyak mengkaji bagaimana kepentingan ekonomi mempengaruhi kebijakan pelestarian. Ada peningkatan fokus pada bagaimana pertahanan ekonomi, perdagangan senjata, dan kejahatan asing yang mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan (Lee & Kim, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dan konservasi semakin terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis. Ketiga, kekuatan ide, bagaimana faktor ideasional membentuk kebijakan pertahanan. Penelitian terdahulu kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor ideasional seperti ideologi, nilai-nilai budaya, dan persepsi masyarakat. Kajian saat ini menyoroti bagaimana ide-ide dan narasi dominan mempengaruhi kebijakan perlindungan. Misalnya, bagaimana ancaman persepsi dipengaruhi oleh wacana politik dan media, serta bagaimana identitas nasional dan ideologi politik mempengaruhi prioritas

pertahanan (Johnson, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor ideasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pengamanan di samping faktor material.

Kesimpulannya, penelitian oleh Smith dan Jones (2015) serta Lee (2017) memberikan dasar yang kuat untuk memahami pengaruh eksternal dalam kebijakan pemeliharaan. Namun, kajian saat ini memperluas pemahaman ini dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik yang mencakup interaksi aktor eksternal, kepentingan ekonomi, dan faktor ideasional. Dengan demikian, kajian kontemporer menawarkan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan untuk menghadapi tantangan keamanan global saat ini.

Dalam ranah perumusan kebijakan keamanan dan pertahanan negara, pengaruh faktor eksternal menjadi semakin signifikan, membentuk keputusan strategis negara. Namun, terlepas dari pentingnya hal itu, ada kebutuhan untuk pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh eksternal ini dan dampaknya terhadap keputusan kebijakan pertahanan. Penelitian ini berusaha untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi sifat multifaset dari faktor-faktor eksternal yang membentuk keputusan kebijakan pertahanan dan implikasinya terhadap strategi keamanan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktor-aktor eksternal utama yang mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan, memungkinkan pembuat kebijakan untuk menavigasi kompleksitas hubungan internasional dalam domain pertahanan. Ini juga meneliti peran kepentingan ekonomi, seperti perdagangan senjata, kontrak pertahanan, dan pertimbangan keamanan energi, dalam membentuk prioritas kebijakan pertahanan negara. Studi ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana faktor ekonomi berinteraksi dengan masalah keamanan untuk membentuk pilihan strategis. Selain itu, penelitian ini menilai pentingnya faktor konseptual dalam perumusan kebijakan pertahanan, seperti narasi keamanan dan persepsi publik tentang ancaman, dalam membentuk proses pengambilan keputusan pembuat kebijakan. Dengan memahami faktor-faktor ini, pembuat kebijakan dapat menavigasi kompleksitas hubungan internasional dalam domain pertahanan dengan lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktor-aktor eksternal utama, seperti negara adidaya, hegemoni regional, dan organisasi internasional, yang mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan. Bab ini juga mengeksplorasi bagaimana kepentingan ekonomi,

seperti perdagangan senjata dan pertimbangan keamanan energi, membentuk prioritas kebijakan pertahanan nasional. Studi ini berfokus pada pengaruh perdagangan senjata, kontrak pertahanan, dan ketergantungan energi terhadap keputusan kebijakan pertahanan. Penelitian ini juga mengkaji pentingnya faktor-faktor ideasional, seperti narasi keamanan dan persepsi masyarakat terhadap ancaman, dalam membentuk perumusan kebijakan pertahanan. Dengan menilai signifikansi faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai peran gagasan dan wacana dalam membentuk strategi keamanan nasional. Kajian tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hubungan internasional di bidang pertahanan..

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif yang memanfaatkan data sekunder menawarkan wawasan berharga untuk memahami kompleksitas faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan metode tersebut, menurut Creswell, dalam konteks penelitian tentang "Dinamika Pengaruh Eksternal dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Pertahanan."

Creswell (2014) menekankan pentingnya analisis data sekunder dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan data yang ada yang dikumpulkan oleh peneliti atau organisasi lain untuk tujuan selain penelitian saat ini. Di bidang penelitian kebijakan pertahanan, sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, publikasi akademis, analisis think tank, dan catatan arsip menyediakan repositori informasi yang kaya untuk analisis.

Pengumpulan data sekunder dimulai dengan mengidentifikasi kumpulan data relevan yang berkaitan dengan keputusan kebijakan pertahanan dan pengaruh eksternal. Peneliti dapat memanfaatkan database, arsip, dan repositori yang mapan untuk mengakses berbagai sumber data. Misalnya, lembaga pemerintah seperti Departemen Pertahanan atau organisasi internasional seperti NATO dapat menyediakan kumpulan data komprehensif tentang pengeluaran pertahanan, aliansi militer, dan perjanjian keamanan.

Creswell (2013) menguraikan berbagai metode untuk menganalisis data sekunder, termasuk analisis konten, analisis tematik, dan analisis naratif. Analisis isi melibatkan pengkategorian dan interpretasi data tekstual secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan tema. Analisis tematik berfokus pada identifikasi tema atau pola berulang dalam data, sementara analisis naratif memeriksa cerita atau narasi yang mendasari yang tertanam dalam data (Creswell, 2014).

Pemanfaatan data sekunder dalam penelitian kualitatif menawarkan beberapa manfaat, termasuk efektivitas biaya, aksesibilitas, dan kemampuan untuk menganalisis kumpulan data besar selama periode yang panjang. Selain itu, analisis data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tren historis dan pola longitudinal dalam pengambilan keputusan kebijakan pertahanan.

Namun, analisis data sekunder juga menyajikan keterbatasan tertentu, seperti potensi bias dalam pengumpulan data, kumpulan data yang tidak lengkap atau tidak konsisten, dan kontrol terbatas atas kualitas data. Para peneliti harus mengevaluasi secara kritis reliabilitas dan validitas sumber data sekunder untuk memastikan kekokohan temuan mereka.

Kesimpulannya, metode penelitian kualitatif menggunakan data sekunder memberikan jalan berharga untuk menyelidiki faktor-faktor eksternal yang membentuk keputusan kebijakan pertahanan. Dengan memanfaatkan kumpulan data yang ada dan menggunakan teknik analisis yang ketat, para peneliti dapat mengungkap wawasan bernuansa dinamika kompleks keamanan internasional dan perencanaan strategis.

3. PEMBAHASAN

3.1 Interaksi Kekuatan: Aktor Eksternal dan Kebijakan Pertahanan Nasional

Kebijakan pertahanan negara tidak dibuat dalam ruang hampa. Jaringan aktor eksternal yang kompleks secara signifikan mempengaruhi keputusan penting ini, membentuk postur dan kemampuan militer suatu negara. Diskusi ini mengeksplorasi aktor eksternal utama yang mengerahkan pengaruh ini dan mekanisme di mana mereka beroperasi, menawarkan wawasan tentang interaksi dinamis kekuasaan dalam hubungan internasional.

Negara adidaya, yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan jangkauan global, berdiri sebagai aktor eksternal yang menonjol. Amerika Serikat, misalnya, memanfaatkan posisinya

melalui aliansi seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization, 2024). Keanggotaan dalam aliansi semacam itu memaksa berbagai negara untuk mengoordinasikan strategi pertahanan dan berpotensi berpartisipasi dalam operasi gabungan, yang secara efektif memperluas jangkauan pengaruh negara adidaya itu (Waltz, 2010). Selain itu, negara adidaya memberikan pengaruh melalui penjualan senjata. Memasok sistem senjata dan pelatihan menciptakan ketergantungan pada pemasok, membentuk kemampuan militer penerima dan berpotensi menyelaraskan pandangan strategis mereka dengan negara adidaya (Drezner, 2011). Selain itu, jaminan keamanan yang ditawarkan oleh negara adidaya, seperti janji intervensi militer jika terjadi serangan, dapat secara signifikan mempengaruhi pengeluaran pertahanan suatu negara dan postur strategis secara keseluruhan, terutama bagi negara-negara kecil yang mencari perlindungan (Fearon, 1994).

Jaminan keamanan yang ditawarkan oleh negara adidaya menghadirkan dilema yang kompleks bagi negara-negara kecil. Sementara mereka bertindak sebagai pencegah yang kuat, menghalangi agresor potensial dan mendorong stabilitas (Mearsheimer, 2021), Jaminan ini datang dengan label harga. Bagian ini mengeksplorasi manfaat dan kerugian dari pengaturan semacam itu, menyoroti tindakan penyeimbangan halus yang harus dilakukan oleh negara-negara kecil.

Di satu sisi, jaminan keamanan memberikan keuntungan yang signifikan. Dengan menghalangi potensi serangan, mereka menciptakan lingkungan yang aman yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan nasional (Waltz, 2010). Terbebas dari beban mempertahankan militer yang besar dan mahal, negara-negara yang lebih kecil dapat mengalokasikan sumber daya untuk prioritas domestik seperti infrastruktur, pendidikan, dan program sosial. Selain itu, penyelarasan dengan negara adidaya dapat menawarkan akses ke pelatihan dan peralatan militer canggih, yang berpotensi meningkatkan kemampuan pertahanan jangka panjang negara melalui proses transfer pengetahuan dan teknologi (Drezner, 2011). Pertimbangkan, misalnya, kasus Jepang setelah Perang Dunia II. Jaminan keamanan AS memungkinkan Jepang untuk melakukan demiliterisasi dan fokus pada pembangunan ekonomi, yang mengarah pada kebangkitannya yang luar biasa sebagai kekuatan ekonomi global.

Namun, manfaat jaminan keamanan datang dengan mengorbankan potensi pembatasan otonomi dan kedaulatan suatu negara. Harga perlindungan dapat menjadi bentuk ketergantungan, seringkali mengharuskan negara yang lebih kecil untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dan

keputusan militernya dengan keputusan negara adidaya (Fearon, 1994). Ini dapat membatasi kemampuan negara untuk mengejar inisiatif diplomatik independen atau terlibat dalam tindakan militer yang bertentangan dengan kepentingan negara adidaya. Potensi hilangnya kedaulatan dapat sangat memprihatinkan ketika tindakan negara adidaya itu menuai kritik atau menyebabkan konflik regional. Sebuah negara yang lebih kecil yang selaras dengan negara adidaya berisiko terjatuh dalam perselisihan jauh melampaui perbatasannya sendiri, menciptakan jalan tali geopolitik yang kompleks (Waltz, 1987).

Kesimpulannya, jaminan keamanan yang ditawarkan oleh negara adidaya adalah pedang bermata dua. Meskipun mereka memberikan keamanan penting dan manfaat ekonomi potensial, mereka juga dapat menyebabkan hilangnya otonomi dan berpotensi melibatkan negara-negara kecil dalam konflik di luar kendali mereka. Menavigasi hubungan yang kompleks ini membutuhkan tindakan penyeimbangan yang rumit, di mana negara-negara yang lebih kecil harus dengan hati-hati mempertimbangkan manfaat keamanan terhadap potensi kendala pada kebebasan mereka untuk mengejar kepentingan nasional yang independen.

Selain negara adidaya, hegemoni regional juga memainkan peran penting. Kemampuan militer mereka yang berkembang dapat mendorong dilema keamanan bagi negara-negara tetangga, yang mengarah pada perlombaan senjata karena masing-masing negara berusaha menjaga keseimbangan kekuatan (Waltz, 1987). Selain itu, hegemoni regional dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan melalui konflik proksi. Dengan mendukung faksi-faksi yang bersaing dalam perselisihan regional, mereka secara tidak langsung membentuk strategi militer dan pengeluaran pihak-pihak yang berseberangan (Hoffman, 2006). Selain itu, hegemoni regional dapat mengusulkan kerangka kerja keamanan kooperatif dalam lingkup pengaruh mereka, yang berpotensi membentuk lanskap pertahanan regional dan mempengaruhi cara negara-negara anggota mendekati tantangan keamanan (Acharya, 2001).

Dinamika hegemoni regional memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan secara keseluruhan. Tindakan dan strategi hegemon regional dapat memiliki efek riak pada negara-negara tetangga, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan dan potensi konflik. Memahami motivasi dan kemampuan hegemoni regional sangat penting bagi pembuat kebijakan dan analis yang ingin menavigasi lingkungan keamanan yang kompleks. Peran hegemoni regional dalam

membentuk kebijakan pertahanan dan kerangka kerja keamanan menyoroti sifat dinamika keamanan yang saling terkait di suatu kawasan. Dengan mengkaji pengaruh hegemoni regional, para pemangku kepentingan dapat mengantisipasi dan merespons potensi tantangan dan konflik keamanan dengan lebih baik (Byun, 2022; Hughes, 2007; Pratama & Sudirman, 2022).

Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga memberikan pengaruh pada kebijakan pertahanan. Partisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB seringkali membutuhkan kemampuan dan penyebaran militer khusus, membentuk struktur pasukan dan pengalaman operasional suatu negara (Fortna, 2008). Selain itu, PBB mempromosikan hukum internasional dan perjanjian pengendalian senjata, menetapkan kerangka kerja normatif yang mempengaruhi cara negara-negara mendekati masalah pertahanan dan pengadaan militer (Ruggie, 2002). Khususnya, organisasi seperti NATO memiliki langkah-langkah keamanan kolektif, mewajibkan anggota untuk saling membela jika terjadi serangan, yang secara signifikan mempengaruhi perencanaan pertahanan dan alokasi sumber daya (North Atlantic Treaty Organization, 2024).

3.1.1 Organisasi Internasional dan Soft Power of Security

Organisasi internasional, di luar kekuatan militer, memberikan pengaruh signifikan pada masalah pertahanan dan keamanan melalui kekuatan diplomasi dan kerja sama. Organisasi-organisasi ini menyediakan platform untuk dialog diplomatik dan resolusi konflik, bertindak sebagai perantara penting dalam mencegah dan mengelola krisis yang dapat meningkat menjadi konflik bersenjata (Brecher, 1997). Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya, memainkan peran penting dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dengan memberi wewenang kepada misi penjaga perdamaian dan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara nakal. Selain itu, organisasi regional seperti Uni Afrika telah mengambil peran yang lebih menonjol dalam menengahi konflik dan mengerahkan misi penjaga perdamaian untuk menstabilkan wilayah yang dilanda perang (Biswaro, 2017). Dengan membina komunikasi dan kerja sama di antara negara-negara anggota, organisasi internasional menciptakan kerangka kerja untuk resolusi konflik damai, yang pada akhirnya berkontribusi pada lingkungan keamanan global yang lebih stabil.

Selain itu, organisasi-organisasi ini sering memberikan pelatihan dan dukungan kepada negara-negara di zona konflik, membantu membangun kapasitas mereka untuk upaya pemeliharaan

perdamaian dan stabilisasi. Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB, misalnya, melatih pasukan penjaga perdamaian dalam resolusi konflik, hak asasi manusia, dan perlindungan warga sipil, meningkatkan efektivitas mereka dalam menjaga perdamaian dan ketertiban (United Nations Department of Peacekeeping Operations, 2024).

Secara keseluruhan, pengaruh organisasi internasional terhadap masalah pertahanan dan keamanan tidak dapat diabaikan. Mereka berfungsi sebagai tempat penting untuk diplomasi, resolusi konflik, dan pembangunan kapasitas, membentuk lanskap global kemampuan dan operasi militer bukan melalui kekuatan militer langsung, tetapi melalui kekuatan kerja sama dan mengejar solusi damai.

Mekanisme di mana aktor-aktor eksternal ini memberikan pengaruh beragam. Diplomasi dan negosiasi sering digunakan untuk mendorong postur pertahanan tertentu atau upaya perlucutan senjata (Romanyshyn, 2017). Insentif ekonomi, seperti menawarkan atau menahan bantuan ekonomi, dapat digunakan untuk mendorong atau mencegah pengeluaran pertahanan atau keputusan pengadaan tertentu (Uttley, 2018). Dalam kasus ekstrem, tindakan koersif seperti ancaman sanksi atau bahkan aksi militer dapat digunakan untuk menekan negara-negara agar mengadopsi kebijakan pertahanan tertentu (Gompert & Binnendijk, 2016). Namun, bentuk pengaruh yang lebih lembut juga digunakan. Berbagi intelijen atau berpartisipasi dalam latihan militer gabungan dapat menciptakan rasa ancaman bersama dan mempengaruhi prioritas pertahanan dengan mendorong kerja sama militer yang lebih erat (Reveron, 2016). Selain itu, diplomasi publik yang bertujuan membentuk opini publik tentang ancaman keamanan secara tidak langsung dapat menekan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan pertahanan khusus yang selaras dengan kepentingan aktor yang mempengaruhi (Löffelholz et al., 2014).

3.2 Interseksi Uang dan Otot: Kepentingan Ekonomi dalam Kebijakan Pertahanan

Kepentingan ekonomi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan strategis dalam kebijakan pertahanan negara, yang tidak hanya didorong oleh masalah keamanan. Diskusi ini mengeksplorasi interaksi antara faktor ekonomi dan keharusan keamanan, dengan fokus pada bagaimana perdagangan senjata, kontrak pertahanan, dan pertimbangan keamanan energi mempengaruhi prioritas kebijakan pertahanan negara.

Perdagangan senjata adalah pendorong ekonomi yang kuat, membentuk kebijakan pertahanan melalui jaringan insentif keuangan dan pertimbangan strategis yang kompleks. Negara-negara dengan industri senjata yang kuat sering memprioritaskan pengeluaran pertahanan dan penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar senjata global (SIPRI Fact Sheet, 2023). Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana keinginan kompleks industri militer untuk mempertahankan pekerjaan dan kepemimpinan teknologi mengesampingkan ancaman keamanan langsung untuk mendorong pengeluaran pertahanan (Roland, 2021). Selain itu, negara-negara dapat menggunakan penjualan senjata sebagai alat untuk kebijakan luar negeri, menjalin aliansi dan membina kerja sama militer yang lebih erat dengan negara-negara penerima (Reveron, 2016). Namun, ini juga dapat menciptakan ketergantungan dan berpotensi melibatkan pemasok dalam konflik regional yang selaras dengan kepentingan pembeli.

Kontrak pertahanan, baik di dalam suatu negara atau melalui kemitraan internasional, juga memainkan peran penting. Pemerintah sering memprioritaskan pengeluaran pertahanan yang menguntungkan industri dalam negeri melalui kontrak yang menguntungkan untuk sistem senjata dan peralatan militer (Bitzinger, 2015). Kontrak-kontrak ini dapat menciptakan konstituen ekonomi dan politik yang kuat yang melobi untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, bahkan ketika kebutuhan keamanan yang sebenarnya mungkin bisa diperdebatkan. Kontrak pertahanan internasional dapat semakin memperumit masalah. Kolaborasi pada sistem persenjataan utama dapat menciptakan saling ketergantungan antar negara, yang berpotensi mempengaruhi postur pertahanan dan keputusan kebijakan luar negeri mereka untuk menjaga kelancaran hubungan dengan mitra utama (Collias, 2014).

Selain itu, kontrak pertahanan internasional juga dapat menyebabkan kekhawatiran tentang transfer teknologi dan potensi informasi sensitif, seperti cetak biru persenjataan canggih, algoritma enkripsi, atau protokol komunikasi yang aman, jatuh ke tangan yang salah (Brown & Singh, 2018). Ini bisa berupa negara-negara bermusuhan yang berusaha menutup kesenjangan teknologi dengan pemasok, organisasi teroris yang bertujuan untuk memperoleh senjata pemusnah massal, atau jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Kebocoran semacam itu dapat secara signifikan membahayakan keamanan nasional dan menciptakan efek riak ketidakstabilan.

Ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menyeimbangkan manfaat ekonomi dari kolaborasi dengan kebutuhan untuk melindungi rahasia teknologi kritis ini. Pemerintah harus membangun mekanisme pengamanan dan kontrol ekspor yang kuat untuk memastikan bahwa informasi dan teknologi sensitif hanya ditransfer ke mitra terpercaya dengan rekam jejak manajemen senjata yang terbukti bertanggung jawab (Grubbs, 2019). Sifat global kontrak pertahanan semakin memperumit persamaan ini. Negara yang berbeda mungkin memiliki peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda-beda mengenai ekspor senjata, sehingga sulit untuk memastikan kepatuhan yang konsisten di seluruh rantai pasokan. Pembuat kebijakan harus menavigasi jaringan peraturan internasional yang kompleks ini dan bermitra dengan negara lain untuk membangun rezim kontrol ekspor yang kuat yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan masalah keamanan nasional (Kinne, 2018).

Pertimbangan keamanan energi adalah faktor penting lainnya yang membentuk prioritas kebijakan pertahanan. Negara-negara yang sangat bergantung pada sumber daya energi impor, terutama minyak dan gas, dapat memprioritaskan kemampuan militer yang memungkinkan mereka untuk mengamankan jalur laut vital dan melindungi infrastruktur energi (Cherp et al., 2012). Hal ini dapat mengarah pada pengembangan kekuatan angkatan laut yang kuat dan bahkan berpotensi intervensi militer di luar negeri untuk menjaga pasokan energi. Misalnya, kebutuhan untuk melindungi jalur pelayaran minyak di Teluk Persia telah secara signifikan mempengaruhi kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan konsumen energi utama lainnya.

3.2.1 Imperatif Geopolitik: Landasan Kebijakan Pertahanan

Selain keamanan energi, lanskap geopolitik suatu negara memainkan peran mendasar dalam membentuk prioritas kebijakan pertahanan (Sarjito et al., 2023). Lokasi strategis suatu negara, aliansi dan persaingannya dengan negara lain, dan ancaman yang dirasakannya semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap perumusan strategi dan kemampuan militer (Mearsheimer, 2021).

Misalnya, negara yang terkurung daratan dengan musuh potensial di sekelilingnya mungkin memprioritaskan memiliki angkatan udara yang kuat untuk penyebaran cepat dan pertahanan perbatasan. Sebaliknya, negara kepulauan seperti Inggris, yang secara historis bergantung pada

kekuatan angkatan lautnya untuk melindungi rute perdagangan dan mempertahankan kerajaan kolonialnya, kemungkinan akan memprioritaskan angkatan laut yang kuat (Mahan, 2020).

Aliansi dan persaingan juga memberikan pengaruh yang kuat. Keanggotaan dalam aliansi seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization, 2024) membentuk strategi pertahanan melalui latihan militer bersama, persenjataan standar, dan perjanjian pertahanan kolektif yang mengharuskan negara-negara anggota untuk saling membantu jika terjadi serangan. Sebaliknya, persaingan sengit dapat menyebabkan perlombaan senjata, di mana negara-negara menuangkan sumber daya untuk mengembangkan kemampuan militer yang melawan kekuatan musuh tertentu, seperti yang terlihat dalam persaingan bersejarah antara AS dan Uni Soviet selama Perang Dingin (Arms Control Association, 2024). Konflik baru-baru ini di Ukraina mencontohkan dinamika ini. Perang yang sedang berlangsung telah mendorong negara-negara tetangga di Eropa Timur untuk menilai kembali prioritas pertahanan mereka dan meningkatkan pengeluaran militer untuk kemampuan yang menghalangi potensi agresi Rusia.

Interaksi antara kepentingan ekonomi dan keharusan keamanan dalam kebijakan pertahanan sangat kompleks dan seringkali bertentangan. Sementara industri senjata yang kuat dan kemampuan militer yang kuat dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, mereka juga dapat menyebabkan pengeluaran yang berlebihan dan berpotensi meningkatkan ketegangan regional (Payne, 2020). Kontrak pertahanan dapat menciptakan lapangan kerja dan kemajuan teknologi, tetapi mereka juga dapat menyebabkan inefisiensi dan tekanan politik untuk proyek-proyek yang tidak perlu. Masalah keamanan energi sangat penting untuk kesejahteraan nasional, tetapi memprioritaskannya dapat menyebabkan militerisasi dan berpotensi menciptakan titik nyala konflik (Grobar & Porter, 1989; Lundmark & Oxenstierna, 2015).

3.2.2 Tindakan Penyeimbangan Halus dalam Lanskap Dinamis

Kebutuhan akan keamanan siber dalam kebijakan pertahanan menjadi semakin penting di era digital. Meningkatnya ancaman serangan siber dari aktor negara dan non-negara, yang dicontohkan oleh serangan ransomware Colonial Pipeline 2021 yang melumpuhkan distribusi bahan bakar di Amerika Serikat, berpotensi mengganggu infrastruktur penting, mencuri data sensitif, dan melumpuhkan layanan penting (CISA, 2021). Menyeimbangkan kebutuhan akan pertahanan siber yang kuat dengan melindungi kebebasan sipil dan hak privasi adalah tali rumit yang harus dinavigasi

oleh pembuat kebijakan. Solusi potensial termasuk membina kemitraan publik-swasta yang kuat untuk meningkatkan berbagi informasi dan mengembangkan norma-norma internasional untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya (Council on Foreign Relations, 2023).

Munculnya taktik perang asimetris, seperti terorisme dan pemberontakan, telah semakin menantang gagasan tradisional tentang strategi pertahanan dan mengharuskan pendekatan keamanan yang lebih fleksibel dan adaptif. Dalam lanskap yang terus berkembang ini, peran kebijakan pertahanan dalam menjaga kepentingan nasional dan mempromosikan stabilitas global tetap menjadi tantangan yang kompleks dan beragam. Memahami interaksi kepentingan ekonomi, narasi ideologis, pertimbangan geopolitik, dan kemajuan teknologi sangat penting untuk merumuskan kebijakan pertahanan yang efektif yang menavigasi kompleksitas lingkungan keamanan abad ke-21.

3.3 Kekuatan Ide: Bagaimana Faktor Ideasional Membentuk Kebijakan Pertahanan

Sementara kebijakan pertahanan negara sering dianggap sebagai ranah yang didominasi oleh kemampuan material dan perhitungan realpolitik, faktor ideasional — gagasan, keyakinan, dan narasi yang membentuk persepsi publik dan elit tentang keamanan — memainkan peran penting dalam perumusannya. Diskusi ini mengeksplorasi pentingnya faktor-faktor ideasional ini, khususnya berfokus pada narasi keamanan dan persepsi publik tentang ancaman, dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembuat kebijakan dan pada akhirnya membentuk strategi keamanan nasional.

Narasi keamanan, cerita dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengkomunikasikan ancaman, secara signifikan mempengaruhi perumusan kebijakan pertahanan (Subotić, 2016). Narasi ini dapat berkisar dari menekankan perlunya militer yang kuat untuk mencegah agresi (narasi realis) hingga memprioritaskan diplomasi dan kerja sama internasional untuk keamanan (narasi liberal). Pembuat kebijakan sering menggunakan narasi ini untuk membenarkan pengeluaran pertahanan, pengerahan pasukan, dan kemampuan militer tertentu. Misalnya, narasi "perang melawan teror" setelah serangan 9/11 secara signifikan mempengaruhi

kebijakan pertahanan AS selama bertahun-tahun, yang mengarah pada peningkatan pengeluaran militer dan fokus pada operasi kontra-pemberontakan (Cutler, 2017).

Namun, penting untuk menyadari bahwa narasi ini tidak statis dan dapat bergeser secara dramatis dalam menanggapi perubahan peristiwa global dan dinamika politik. Munculnya ancaman keamanan baru, seperti perang siber dan perubahan iklim, telah menyebabkan pengembangan narasi alternatif yang memprioritaskan berbagai aspek keamanan nasional. Misalnya, konsep "keamanan dalam negeri" berkembang secara signifikan setelah serangan 9/11 untuk mencakup berbagai ancaman yang lebih luas di luar aktor negara tradisional, dengan fokus pada melindungi warga negara dari terorisme dan organisasi kriminal transnasional (Office of Management and Budget [OMB], 2007). Selain itu, munculnya aktor non-negara dan meningkatnya keterkaitan dunia telah menantang narasi tradisional yang hanya berfokus pada masalah keamanan yang berpusat pada negara. Dengan demikian, pembuat kebijakan harus terus menilai kembali dan menyesuaikan narasi mereka untuk secara efektif mengatasi lanskap keamanan yang berkembang. Dengan menyusun narasi yang beresonansi dengan publik dan mengumpulkan dukungan untuk langkah-langkah keamanan yang diperlukan, pembuat kebijakan dapat memastikan pendekatan yang lebih komprehensif dan mudah beradaptasi terhadap keamanan nasional.

Persepsi publik tentang ancaman juga memainkan peran penting. Jajak pendapat publik, liputan media, dan aktivisme warga semuanya dapat mempengaruhi cara pembuat kebijakan memandang tantangan keamanan dan memprioritaskan pengeluaran pertahanan (Mueller, 2016). Ketakutan publik yang meningkat terhadap ancaman tertentu, seperti serangan siber atau proliferasi nuklir, dapat menyebabkan peningkatan tekanan untuk tindakan pemerintah, yang berpotensi mendorong investasi dalam kemampuan defensif atau serangan pendahuluan ofensif. Sebaliknya, kelelahan publik dengan konflik yang berlangsung lama atau skeptisisme umum terhadap intervensi militer dapat bertindak sebagai kendala pada kebijakan pertahanan, membatasi pengeluaran atau menghambat penempatan di luar negeri.

3.3.1 Opini Publik dan Kebijakan Pertahanan: Jalan Dua Arah

Hubungan antara opini publik dan kebijakan pertahanan adalah tarian yang kompleks. Pembuat kebijakan mengandalkan dukungan publik untuk berhasil menerapkan strategi keamanan (Nye, 2004). Opini publik bertindak sebagai ukuran penting dari toleransi risiko suatu negara dan

kesediaan untuk melakukan sumber daya terhadap inisiatif militer. Misalnya, selama Perang Dunia II, dukungan publik yang luar biasa di Amerika Serikat untuk mengalahkan Nazi Jerman memungkinkan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya dan tenaga kerja yang signifikan (Patterson, 2014).

3.3.2 Peran Media dalam Membentuk Persepsi Publik

Media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang masalah keamanan (Gelpi, 2017). Outlet berita dapat membingkai ancaman keamanan dan tindakan militer dengan cara tertentu, mempengaruhi persepsi publik dan, pada akhirnya, keputusan kebijakan. Misalnya, liputan media yang menekankan biaya kemanusiaan dari suatu konflik dapat menimbulkan tekanan publik untuk mencari solusi diplomatik (Hudson, 2023). Opini publik tentang masalah pertahanan tidak statis. Ini dapat berkembang pesat dalam menanggapi peristiwa terkini, seperti serangan teroris atau kemunduran militer. Pembuat kebijakan harus dapat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan ini untuk menjaga kepercayaan dan legitimasi publik (Mearsheimer, 2021).

4. KESIMPULAN

Kebijakan pertahanan suatu negara tidak semata-mata bergantung pada faktor internal. Interaksi yang kompleks antara aktor eksternal, termasuk negara adidaya, hegemoni regional, dan organisasi internasional, secara signifikan membentuk keputusan penting ini. Dengan memahami mekanisme yang digunakan oleh aktor-aktor ini, mulai dari diplomasi dan insentif ekonomi hingga kerja sama militer dan tekanan publik, kami memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika hubungan internasional di ranah pertahanan. Pengetahuan ini sangat penting untuk menavigasi kompleksitas lanskap keamanan global yang terus berkembang.

Kepentingan ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk prioritas kebijakan pertahanan. Memahami pengaruh perdagangan senjata, kontrak pertahanan, dan pertimbangan keamanan energi sangat penting untuk menganalisis pengambilan keputusan strategis. Dengan mengakui interaksi antara pertimbangan ekonomi dan kebutuhan keamanan, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana negara-negara menavigasi dunia kebijakan pertahanan yang kompleks.

Faktor ideasional, khususnya narasi keamanan dan persepsi publik tentang ancaman, secara signifikan mempengaruhi perumusan kebijakan pertahanan. Mengakui kekuatan ide-ide ini sangat penting untuk pemahaman yang komprehensif tentang strategi keamanan nasional. Dengan menganalisis narasi dan opini publik yang membentuk lingkungan keamanan suatu negara, kami memperoleh wawasan berharga tentang proses pengambilan keputusan pembuat kebijakan dan interaksi yang kompleks antara ranah gagasan dan realitas pertahanan nasional.

Referensi

- Acharya, A. (2001). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and regional order*.
- Arms Control Association. (2024, May 10). *Arms Control Association*. <https://www.armscontrol.org/>
- Biswaro, J. (2017). Role of Regional Integration in Conflict Prevention Management and Resolution in Africa. *Crisis Research Center London*.
- Bitzinger, R. A. (2015). Defense industries in Asia and the technonationalist impulse. *Contemporary Security Policy*, 36(3), 453–472.
- Brecher, M. (1997). *Theories of international relations*. Cambridge University Press.
- Brown, M., & Singh, P. (2018). China's technology transfer strategy. *Silicon Valley, CA: Defense Innovation Unit Experimental Report*, 8, 10–12.
- Byun, J. (2022). Regional security cooperation against hegemonic threats: Theory and evidence from France and West Germany (1945–65). *European Journal of International Security*, 7(2), 143–163.
- Cherp, A., Adenikinju, A., Goldthau, A., Hernandez, F., Hughes, L., Jewell, J., Olshanskaya, M., Jansen, J., Soares, R., & Vakulenko, S. (2012). Energy and security. In *Global energy assessment: Toward a sustainable future* (pp. 325–383). Cambridge University Press.
- CISA. (2021, May 12). *CISA: Colonial Pipeline Ransomware Attack*.
- Collias, D. (2014). International arms cooperation and alliance behavior. *International Security*, 38(4), 137–171.
-

- Collier, P. , & B. A., & Collier, P. , & B. A. (2019). *The energy security nexus*. Routledge.
- Council on Foreign Relations. (2023, April 12). *Council on Foreign Relations: Cyber Security*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Cutler, L. (2017). *President Obama's counterterrorism strategy in the war on terror: An assessment*. Springer.
- Doyle, M. W. (1997). *Ways of war and peace: Realism, liberalism, and Christian just war tradition*. Little, Brown and Company.
- Drezner, A. (2011). *Theories of international politics*. Cengage Learning.
- Fearon, J. D. (1994). Signals of war: An assessment of rational deterrence theory. *American Political Science Review*, 88(2), 353–378.
- Fortna, V. P. (2008). *Peacekeeping: The evolution of international security systems*. Routledge.
- Gelpi, C. (2017). Democracies in conflict: The role of public opinion, political parties, and the press in shaping security policy. *Journal of Conflict Resolution*, 61(9), 1925–1949.
- Gilpin, R. (1981). *War and change in world politics*. Cambridge University Press.
- Gompert, D., & Binnendijk, H. (2016). The power to coerce. *Cal., RAND*, 3–41.
- Grobar, L. M., & Porter, R. C. (1989). Benoit revisited: defense spending and economic growth in LDCs. *Journal of Conflict Resolution*, 33(2), 318–345.
- Grubbs, E. N. (2019). Academic espionage: Striking the balance between open and collaborative universities and protecting national security. *North Carolina Journal of Law & Technology*, 20(5), 235.
- Hoffman, S. B. (2006). The empire strikes back: The resurgence of nationalism and the future of international order. *Foreign Affairs*, 85(4), 60–77.
-

- Hudson, E. (2023). Public Opinion and Foreign Policy Decision-Making. *Global Journal of International Relations*, 1(1), 49–60.
- Hughes, C. R. (2007). New security dynamics in the Asia-Pacific: Extending regionalism from Southeast to Northeast Asia. *The International Spectator*, 42(3), 319–335.
- Kinne, B. J. (2018). Defense cooperation agreements and the emergence of a global security network. *International Organization*, 72(4), 799–837.
- Löffelholz, M., Auer, C., & Srugies, A. (2014). Strategic dimensions of public diplomacy. In *The Routledge handbook of strategic communication* (pp. 439–458). Routledge.
- Lundmark, M., & Oxenstierna, S. (2015). Defence Procurement and Economic Efficiency—In Search for a Framework for Comparative Analyses. *FOI Higher Seminar*, 31.
- Mahan, A. T. (2020). *The influence of sea power upon history, 1660-1783*. Good Press.
- Mearsheimer, J. J. (2021). The inevitable rivalry: America, China, and the tragedy of great-power politics. *Foreign Aff.*, 100, 48.
- Mueller, J. (2016). *Public opinion and the nuclear arms race*. Oxford University Press.
- North Atlantic Treaty Organization. (2024, May 10). *North Atlantic Treaty Organization*. North Atlantic Treaty Organization. <https://www.nato.int/>
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public affairs.
- Office of Management and Budget [OMB]. (2007). *National strategy for homeland security*. <https://www.dhs.gov/publication/first-national-strategy-homeland-security>
- Patterson, R. P. (2014). *Arming the Nation for War: Mobilization, Supply, and the American War Effort in World War II*. Univ. of Tennessee Press.
- Payne, A. (2020). *National security and defense: An introduction*. Polity Press.

- Pratama, J. A., & Sudirman, A. (2022). Between the Regional and the National Level: East Asian Security Dynamics and Abe's Legacy on Japan's Civil-Military Relations. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 24(2), 227–251.
- Reuters. (2024, March 15). *Eastern Europe Bolsters Defenses as War in Ukraine Rages On*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-repels-russian-attacks-situation-is-difficult-top-general-says-2024-02-29/>
- Reveron, D. S. (2016). *Exporting security: International engagement, security cooperation, and the changing face of the US military*. Georgetown University Press.
- Roland, A. (2021). *Delta of power: the military-industrial complex*. JHU Press.
- Romanyshyn, I. (2017). *The European Union: An Effective Actor in Multilateral Arms Negotiations?*
- Ruggie, J. G. (2002). *Constructing the World Polity: essays on international institutionalisation*. Routledge.
- Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. (2023). *Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global*. Indonesia Emas Group.
- Schweller, R. L. (2006). Unilateralism and the international monetary system. *International Organization*, 60(2), 381–414.
- SIPRI Fact Sheet. (2023). *TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2022*. https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf
- Subotić, J. (2016). Narrative, ontological security, and foreign policy change. *Foreign Policy Analysis*, 12(4), 610–627.
- United Nations Department of Peacekeeping Operations. (2024). *UN peacekeeping*. <https://peacekeeping.un.org/>
- Uttley, M. (2018). Defence procurement. *Routledge Handbook of Defence Studies*, 72–86.
-

Waltz, K. N. (1987). *The spread of nuclear weapons: More may be better*. Adelphi Papers (219).

Waltz, K. N. (2010). *Theory of international politics*. Waveland Press.